



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

NOMOR: 02/PANSEL-CASN/07/2021

TENTANG

**SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 888 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021, kami memberikan kesempatan kepada Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian PPN/Bappenas dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021 adalah sebanyak 108 formasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Formasi dengan kualifikasi lulusan S-1 sebanyak 108
- Informasi rinci dapat dilihat pada lampiran

II. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK, anggota TNI/POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Bagi pelamar Jabatan Fungsional Perencana diutamakan memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang Perencanaan Pembangunan dan bagi pelamar Jabatan Fungsional Arsiparis diutamakan memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang Pengelolaan Arsip Perencanaan Pembangunan, dibuktikan dengan surat keterangan:
 - a. Minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah;
 - b. Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta/lembaga swadaya non-pemerintah/yayasan;

10. Bersedia ditempatkan di unit kerja manapun di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai PPPK);
12. Berkelakuan baik;
13. Tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
14. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, di Dalam Negeri atau Luar Negeri yang program studinya telah **TERAKREDITASI** oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat tanggal kelulusan, dengan persyaratan S-1/Sarjana minimal **2,75 (dua koma tujuh puluh lima)** dalam skala 4;
15. Untuk lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah luar Negeri pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
16. Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK, pada satu instansi dan satu formasi jabatan, menggunakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apabila pelamar sudah melamar pada Kementerian PPN/Bappenas, maka tidak dapat melamar pada instansi lain.
2. Program studi pelamar terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
3. Peserta CPNS tahun 2019 yang sudah mendapat NIP oleh BKN namun mengundurkan diri, tidak dapat mendaftar pada Seleksi PPPK tahun 2021;
4. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dan pada saat melamar wajib melampirkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan derajat kedisabilitasnya dan wajib mengunggah *link* (tautan) video kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas kedalam SSCASN pada saat pendaftaran;
5. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
6. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi CASN Kementerian PPN/Bappenas diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut.
7. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;
8. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi pelamar yang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi PPPK adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Kementerian PPN/Bappenas.

IV. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online*, dimulai dari 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* serta mengunggah (*upload*) scan dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a. Swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun;
 - b. Surat Lamaran asli berwarna ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, dan ditandatangani di atas materai Rp.10.000,-. (format surat lamaran dapat diunduh di laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk>);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli berwarna atau Surat Keterangan asli berwarna telah melakukan rekaman kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
 - d. Ijazah dan Transkrip Nilai asli berwarna;
 - e. Surat Pernyataan asli berwarna yang telah diisi dan ditandatangani dan dibubuhi materai Rp.10.000,-. (format surat pernyataan terlampir dapat diunduh di laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk>);
 - f. Surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah asli berwarna yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas (bagi penyandang disabilitas dan dan format contoh surat keterangan dapat diunduh di laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk>);
 - g. *Link* (tautan) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar (bagi penyandang disabilitas);
 - h. Sertifikat/bimbingan teknis pengelolaan arsip aktif/dinamis (bagi pelamar Jabatan Fungsional Arsiparis apabila ada);
 - i. Pas foto ukuran 4 X 6 dengan latar belakang merah.
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Bagi pelamar penyandang disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada formasi umum;
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada 29 Juli 2021 dan dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Kompetensi terdiri dari tiga jenis, yaitu Teknis, Manajerial, dan Sosio-Kultural yang dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN. Peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan nilai ambang batas yang telah ditetapkan berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Teknis tambahan (TPA) khusus Jabatan Fungsional Perencana)* dan Seleksi Wawancara.
2. Seluruh rangkaian seleksi akan dilaksanakan baik secara *online* dan *offline* (hadir secara fisik) ditempat yang telah ditentukan dan mengikuti standar protokol kesehatan yang berlaku.

No.	Tahapan Seleksi	Keterangan	Metode
1	Seleksi Administrasi	-	
2	Seleksi Kompetensi Teknis	Menggunakan CAT BKN	<i>Offline</i> (hadir fisik)
3	Seleksi Kompetensi Manajerial		
4	Seleksi Kompetensi Sosio-Kultural		
5	Seleksi Kompetensi Teknis tambahan (TPA)*		
6	Seleksi Wawancara		<i>Online</i>
7	Penetapan Kelulusan Berdasarkan Integrasi Data Panselnas		

Catatan: Setiap tahapan seleksi menerapkan sistem gugur

VI. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Khusus Jabatan Fungsional Perencana, penilaian Tes Potensi Akademik (TPA) dalam SKT tambahan didasarkan pada skor nilai minimum TPA yaitu 500.
3. Penilaian wawancara meliputi integritas dan moralitas.
4. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan integrasi hasil nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

VII. JADWAL SELEKSI PPPK

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman Seleksi	1 Juli s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi	1 Juli s.d. 21 Juli 2021
3	Seleksi Administrasi dan Pengumuman Hasilnya	29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 9 Agustus 2021
5	Seleksi Kompetensi PPPK	Agustus s.d. September 2021
6	Pengumuman Akhir dan Masa Sanggah	Oktober s.d. November 2021
7	Penetapan Nomor Induk PPPK	18 s.d. 31 Desember 2021

Catatan:

1. Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui *website* <https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk> atau <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Jadwal dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait status Pandemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan dimaksud.
3. Peserta wajib memantau informasi jadwal di *website* tersebut.

VIII. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Panitia Seleksi Penerimaan CASN Kementerian PPN/Bappenas tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Penerimaan CASN di Kementerian PPN/Bappenas.
2. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di Kementerian PPN/Bappenas dengan atau tanpa meminta imbalan tertentu, agar diabaikan dan tindakan tersebut adalah ilegal (kejahatan). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
3. Kebutuhan informasi dan laporan pengaduan berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi CASN Kementerian PPN/Bappenas dilayani melalui email Sekretariat Panitia Seleksi CASN rekrutmen@bappenas.go.id dan nomor telepon 021-3905646 maupun SSCASN Helpdesk pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Pelamar dapat mengakses informasi Seleksi CASN Kementerian PPN/Bappenas melalui akun media sosial @BappenasRI di Twitter, Instagram, dan Youtube.
4. Peserta yang tidak hadir pada setiap tahapan seleksi dinyatakan **GUGUR**.
5. Peserta yang dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi, dan/atau yang telah mendapat NIP tetapi mengundurkan diri dengan alasan apapun dikenakan sanksi berupa wajib mengganti biaya seleksi yang telah dikeluarkan Panitia sebesar **Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)** untuk disetorkan kepada Kas Negara. Di samping itu, peserta yang mengundurkan

diri dikenakan sanksi lain berupa tidak dapat mendaftar pada Seleksi CASN untuk periode berikutnya.

6. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Apabila pelamar dikemudian hari diketahui memberikan keterangan/data/informasi yang tidak benar, Kementerian PPN/Bappenas berhak menggugurkan kelulusan pelamar tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK, dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
8. Seluruh kegiatan penerimaan CASN diselenggarakan dengan tetap memperhatikan **Protokol Kesehatan** yang berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Jakarta, 1 Juli 2021

Ketua Panitia Seleksi,




Himawan Hariyoga 

No.	Unit Kerja	Jabatan CPNS	Jenjang Pendidikan CPNS	Jurusan/Pendidikan	Formasi CPNS				Formasi PPPK	
					Umum	Khusus				Jumlah Formasi
						Cum	Dis	Papua		
6	BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ekonomi / Keuangan / Akuntansi / Manajemen / Administrasi / Ilmu Administrasi Negara / Hubungan Internasional / Administrasi Publik / Manajemen dan Kebijakan Publik	3				3	4
7	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Administrasi Negara / Administrasi Publik / Ilmu Hukum/ Manajemen/ Psikologi/ Akuntansi/ Manajemen dan Kebijakan Publik	4				4	4
8	BIRO UMUM	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Teknik Arsitektur / Teknik Informatika / Ilmu Hukum / Ekonomi / Akuntansi / Manajemen / Ilmu Administrasi/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin / Teknik Elektro	-				-	10
9	DIREKTORAT PERENCANAAN MAKRO DAN ANALIS STATISTIK	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S1	Sastra Inggris / Pendidikan	-				-	1
		AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Akuntansi / Manajemen Keuangan / Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan / Ilmu Ekonomi Islam / Ilmu Ekonomi Syariah	2				2	1
10	DIREKTORAT JASA KEUANGAN DAN BUMN	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ekonomi Pembangunan / Ilmu Ekonomi / Ekonomi dan Studi Pembangunan / Ilmu Ekonomi Islam / Ilmu Ekonomi Syariah	-				-	4
11	DIREKTORAT KEUANGAN NEGARA DAN ANALISIS MONETER	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ilmu Administrasi Publik / Ilmu Administrasi Negara / Ilmu Administrasi Fiskal / Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Teknik Informatika / Sistem Informasi	4	1			5	-
12	DIREKTORAT INDUSTRI, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi dan Studi Pembangunan / Statistika / Teknik Industri / Manajemen / Bisnis dan Manajemen / Teknik Informatika / Manajemen Informatika / Teknik Lingkungan	3				3	1
13	DIREKTORAT PERDAGANGAN, INVESTASI DAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ekonomi Pembangunan / Ilmu Ekonomi / Ekonomi dan Studi Pembangunan / Teknik Industri / Statistika	2				2	2

No.	Unit Kerja	Jabatan CPNS	Jenjang Pendidikan CPNS	Jurusan/Pendidikan	Formasi CPNS				Formasi PPPK	
					Umum	Khusus				Jumlah Formasi
						Cum	Dis	Papua		
14	DIREKTORAT PERKOTAAN, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN-KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Teknik Sipil / Teknik Lingkungan / Kesehatan Lingkungan / Kesehatan Masyarakat / Ekonomi / Finance	4	1		1	6	-
15	DIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S1	Administrasi Publik / Kearsipan / Sistem Informasi (Manajemen Informatika) / Administrasi Negara/ Manajemen dan Kebijakan Publik	-				-	1
		AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Kelautan / Perikanan / Hubungan Internasional / Hukum / Ekonomi / Statistika / MIPA	3	1			4	-
16	DIREKTORAT KEHUTANAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S1	Sekretaris / Kearsipan	-				-	1
		AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Sipil / Teknik Pengairan / Ilmu Tanah dan Sumber Daya Air / Bioteknologi / Geografi / Sosiologi Pembangunan	2				2	2
17	DIREKTORAT SUMBER DAYA ENERGI, MINERAL DAN PERTAMBANGAN	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ilmu Ekonomi / Teknik Elektro	3				3	-
18	DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Teknik Industri / Teknik Komputer / Teknik Informatika / Sistem Informasi / Arsitektur Lanskap / Geografi / Geodesi / Ekonomi Pembangunan / Ilmu Ekonomi / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan / Biologi / Kehutanan / Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata / Manajemen Sumber Daya Lahan / Ilmu Hukum / Hukum Lingkungan / Hukum Sumber Daya Alam / Planologi / Perencanaan Wilayah Kawasan / Meteorologi / Meteorologi Terapan / Oseanografi	-				-	6
19	DIREKTORAT PANGAN DAN PERTANIAN	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ekonomi Pembangunan / Statistika / Hukum	-				-	4

No.	Unit Kerja	Jabatan CPNS	Jenjang Pendidikan CPNS	Jurusan/Pendidikan	Formasi CPNS				Formasi PPPK	
					Umum	Khusus				Jumlah Formasi
						Cum	Dis	Papua		
20	DIREKTORAT TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ilmu Ekonomi / Ekonomi Studi Pembangunan / Ekonomi SDM / Statistika / Ilmu Hukum	-				-	4
21	DIREKTORAT PERENCANAAN KEPENDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ilmu Ekonomi / Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota / Planologi / Statistika / Teknik Informatika / Ilmu Kesejahteraan Sosial / Kesehatan Masyarakat / Antropologi / Sosiologi	2				2	2
22	DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Statistik / Ilmu Ekonomi / Sosiologi / Teknik Industri / Planologi / Sosial Ekonomi Pertanian / Agribisnis	1				1	3
23	DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI, IPTEK DAN KEBUDAYAAN	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S1	Administrasi Kantor / Administrasi Negara / Kearsipan/ Administrasi Publik/ Manajemen dan Kebijakan Publik	-				-	1
		AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Teknik Sipil / Manajemen Aset / Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Planologi / Sosiologi / Antropologi / Sejarah / Teknik Sipil / Manajemen Aset / Teknik Mesin / Teknik Industri / Teknik Fisika	2				2	2
24	DIREKTORAT KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Geografi / Statistik / Ilmu Kedokteran / Farmasi / Ilmu Pangan / Gizi / Epidemiologi / Kesehatan Lingkungan / Teknik Informatika / Sistem Informasi / Manajemen Informasi	3				3	2
25	DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN AGAMA	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Statistika / Matematika / Planologi / Arsitektur / Perencanaan Wilayah dan Kota / Teknik Industri / Manajemen Rekayasa Industri / Ilmu Pendidikan / Antropologi / Sosiologi / Ilmu Ekonomi / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan / Ekonomi Pembangunan / Administrasi Negara / Administrasi Publik / Ilmu Agama/ Manajemen dan Kebijakan Publik	3	1			4	2

No.	Unit Kerja	Jabatan CPNS	Jenjang Pendidikan CPNS	Jurusan/Pendidikan	Formasi CPNS					Formasi PPPK
					Umum	Khusus			Jumlah Formasi	
						Cum	Dis	Papua		
26	DIREKTORAT KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA DAN OLAHRAGA	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ilmu Pemerintahan / Kesehatan Masyarakat / Planologi / Ilmu Ekonomi / Antropologi / Kriminologi / Statistik / Ilmu Keluarga / Desain Grafis	-				-	4
27	DIREKTORAT ENERGI, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S1	Manajemen	-				-	2
28	DIREKTORAT KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DAN RANCANG BANGUN	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Statistik / Teknik Informatika / Komputer / Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota / Teknik Planologi / Teknik Lingkungan / Teknik Sipil / Akuntansi / Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Manajemen Bisnis	3	1			4	0
29	DIREKTORAT TRANSPORTASI	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Teknik Industri / Computer Science / Teknik Sipil / Ekonomi	-				-	4
30	DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ilmu Komunikasi / Ilmu Politik	-				-	4
31	DIREKTORAT POLITIK LUAR NEGERI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ekonomi Pembangunan / Hubungan Internasional / Ilmu Politik / Ilmu Komunikasi / Administrasi Negara / Teknik Informatika/ Manajemen dan Kebijakan Publik	-				-	4
32	DIREKTORAT APARATUR NEGARA	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Administrasi Negara / Administrasi Publik / Pemerintahan / Hukum Tata Negara /Komputer / Informatika /Desain Visual / Komunikasi / Ilmu Ekonomi	2				2	2
33	DIREKTORAT PERTAHANAN DAN KEAMANAN	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ekonomi Pembangunan / Sosiologi / Teknik Industri / Manajemen /Hubungan Internasional / Statistik / Teknik Mesin / Teknik Sipil / Perencanaan Wilayah dan Kota / Teknik Informatika / Sistem Informasi / Teknik Elektro / Hukum / Hubungan Internasional	1	1			2	2
34	DIREKTORAT HUKUM DAN REGULASI	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Hukum Pidana / Hukum Perdata / Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara	2				2	2

No.	Unit Kerja	Jabatan CPNS	Jenjang Pendidikan CPNS	Jurusan/Pendidikan	Formasi CPNS				Formasi PPPK	
					Umum	Khusus				Jumlah Formasi
						Cum	Dis	Papua		
35	DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PENDANAAN PEMBANGUNAN	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ilmu Statistik / Ilmu Komputer / Teknik Informatika / Sistem Informasi	-				-	4
36	DIREKTORAT PENDANAAN LUAR NEGERI BILATERAL	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ekonomi / Teknik Sipil / Teknik Planologi / Teknik Informatika / Hukum Internasional	2				2	1
37	DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Ekonomi Pembangunan / Pertanian / Perkebunan / Teknik Informatika / Teknik Sipil / MIPA / Manajemen Keuangan	2	1			3	1
38	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDANAAN PEMBANGUNAN	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Akuntansi / Ekonomi Pembangunan / Hukum	-				-	3
39	DIREKTORAT PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SEKTORAL	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S1	Manajemen / Ilmu Administrasi	-				-	1
		AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Hukum / Ilmu Politik / Hubungan Internasional / Teknik Informatika / Sistem Informasi (Manajemen Informatika)	1	1			2	-
40	DIREKTORAT PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Statistika / Perencanaan Wilayah Kota / Ilmu Ekonomi	-				-	4
41	DIREKTORAT SISTEM DAN PELAPORAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Statistika / Planologi / Perencanaan Wilayah Kota	1				1	3

No.	Unit Kerja	Jabatan CPNS	Jenjang Pendidikan CPNS	Jurusan/Pendidikan	Formasi CPNS				Formasi PPPK	
					Umum	Khusus				Jumlah Formasi
						Cum	Dis	Papua		
42	INSPEKTORAT BIDANG KINERJA KELEMBAGAAN	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1	Akuntansi / Ekonomi Pembangunan / Hukum	2				2	2
TOTAL FORMASI					82	10	2	2	96	108

Jakarta, 1 Juli 2021

Ketua Panitia Seleksi,



Himawan Hariyoga

Himawan Hariyoga